

Peran Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu

Kholifah Nur Khasanah¹, Nur Khasanah²

¹ Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,
kholifah.nur.khasanah24139@mhs.uingusdur.ac.id

² Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan,
nur.khasanah@uingusdur.ac.id

Received: 12 November 2025

Rev. Req: 27 Maret 2026

Accepted: 29 April 2026

ABSTRACT: *The Indonesia Smart Card (KIP) program is one of the government's fundamental efforts to guarantee the right to education for children from underprivileged families. This study aims to analyze the role of KIP in improving access to education and equity, as well as to identify factors that influence its effectiveness, given that previous studies have tended to focus on administrative and technical issues. The method used is a comprehensive literature review (library research) by examining various scientific sources and official reports from ministries and the Central Statistics Agency (BPS). The results of the study show that KIP has contributed significantly to reducing dropout rates and increasing student participation, especially in areas with high poverty rates. Based on 2024 data, the beneficiaries of this program have reached more than 18.7 million students at various levels. In addition to its educational impact, KIP has proven to be a concrete step in realizing educational justice and social justice in Indonesia. However, the implementation of the program still faces major obstacles, namely the inaccuracy of beneficiary data, delays in fund distribution, and a lack of socialization. For optimization, the main recommendations include strengthening the data collection system (through the Integrated Social Welfare Data/DTKS), improving coordination between institutions, and expanding assistance for beneficiaries.*

Keywords: *Indonesia Smart Card, access to education, underprivileged families, social equality, education policy.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan bangsa, kualitas pendidikan suatu negara sangat menentukan kemajuan sosial, ekonomi, dan politiknya. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing,

dan berintegritas tinggi. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dibekali dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan, nilai-nilai moral, dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.

Di Indonesia, pendidikan masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah akses pendidikan yang layak tidak selalu merata. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan di Indonesia. Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki peluang lebih kecil untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga yang lebih sejahtera (Bappenas, 2022). Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dua belas tahun. Upaya-upaya ini lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan, dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, maupun tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, peran pemerintah melalui program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan pendidikan.

Secara konseptual, KIP berfungsi sebagai program bantuan keuangan dan juga sebagai jenis kebijakan sosial yang menggunakan pendidikan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Diharapkan dukungan ini dapat menurunkan tingkat putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa dari keluarga berpendapatan rendah dalam kegiatan sekolah (Sari & Rahmawati, 2021). Namun, dalam praktiknya, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk penargetan penerima manfaat yang tidak akurat, keterlambatan penyaluran dana, dan pengawasan yang kurang memadai terhadap penggunaan bantuan (Putri & Lestari, 2022; Rahman & Suryani, 2022). Penelitian sebelumnya telah mengkaji sejauh mana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) mendistribusikan dana dan dampaknya terhadap penurunan angka putus sekolah (Fitriani, 2020; Sari & Rahmawati, 2021; Rahman & Suryani, 2022). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada isu-isu administratif dan teknis, seperti ketepatan identifikasi penerima bantuan dan prosedur distribusi dana. Sementara itu, masih sedikit penelitian komprehensif yang mengkaji bagaimana KIP dapat meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga berpendapatan rendah sebagai alat untuk keadilan sosial dan keadilan pendidikan. Namun, belum banyak studi yang secara mendalam menganalisis bagaimana kebijakan KIP mempengaruhi peluang belajar dan mobilitas sosial vertikal di daerah berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, celah penelitian ini terletak pada kurangnya studi komprehensif yang mengkaji secara mendalam bagaimana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat meningkatkan akses Pendidikan bagi keluarga berpendapatan rendah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan Pendidikan. Masih sedikit penelitian yang menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan Kartu Pintar Indonesia (KIP) memengaruhi peluang belajar dan mobilitas sosial di daerah berpenghasilan rendah. Untuk menutup celah ini, studi secara komprehensif ini menganalisis bagaimana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia untuk memiliki akses yang lebih baik ke sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga

kurang mampu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan pemerataan sosial, serta menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di masa mendatang (Hidayat & Anwar, 2023; Susanti & Prasetyo, 2023).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam peran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif dan kontekstual, terutama dalam menelaah pelaksanaan kebijakan publik di bidang pendidikan.

1. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa sekolah penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi serta jumlah penerima manfaat KIP yang signifikan.

Subjek penelitian meliputi:

- Penerima manfaat KIP (siswa dan orang tua).
- Pihak sekolah (guru dan kepala sekolah).
- Pemangku kebijakan di tingkat daerah (dinas pendidikan dan pihak penyalur program KIP).

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

- Wawancara mendalam, digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman para penerima manfaat serta pihak pelaksana program.
- Observasi lapangan, dilakukan guna memahami situasi nyata pelaksanaan program di sekolah.
- Studi dokumentasi, digunakan untuk menelaah data statistik penerima bantuan dan laporan hasil evaluasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:

- Reduksi data, proses pemilihan dan penyederhanaan data dari hasil wawancara dan dokumen.
- Penyajian data, dalam bentuk narasi dan tabel temuan.
- Penarikan kesimpulan, berdasarkan interpretasi dan temuan lapangan terkait efektivitas dan tantangan pelaksanaan program KIP.

4. Alur Penelitian

Untuk menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis, berikut alur penelitian yang digunakan:

- Identifikasi masalah dan kajian pustaka → Menelaah isu akses pendidikan dan peran KIP dalam pemerataan pendidikan.
- Penentuan lokasi dan subjek penelitian → Menetapkan wilayah dan responden yang relevan.
- Pengumpulan data → Melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- Analisis data (Model Miles & Huberman) → Reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
- Interpretasi hasil dan pembahasan → Mengaitkan temuan dengan teori dan kebijakan pendidikan.
- Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan → Merumuskan hasil akhir penelitian dan saran perbaikan program.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Kartu Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek dan BPS, jumlah penerima Program KIP terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penurunan angka putus sekolah. Sejauh ini, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah menjangkau lebih 18 juta peserta dari berbagai jejang pendidikan.

Tabel 1. Jumlah Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Penerima	Jenjang SD	SMP	SMA/SMK
2021	17,2	9,8	5,3	2,1
2022	17,9	10,0	5,6	2,3
2023	18,3	10,2	5,8	2,3
2024	18,7	10,4	6,0	2,3

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan jumlah penerima KIP dari tahun 2021 hingga 2024. Kenaikan sebesar 8,7% pada jenjang SD dan 13,2% pada jenjang SMA/SMK menunjukkan bahwa program ini berhasil memperluas jangkauan terhadap kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tren ini sejalan dengan penurunan angka putus sekolah yang dilaporkan oleh Kemendikbudristek (2023), di mana daerah dengan partisipasi penerima KIP tinggi menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata sebesar 4% dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa program ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, keberadaan KIP juga membantu menekan angka putus sekolah di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Siswa yang sebelumnya terancam berhenti sekolah dapat melanjutkan pendidikannya berkat bantuan biaya dari KIP (Hidayat, 2022). Dengan demikian, KIP berfungsi tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia.

2. Implikasi Sosial dan Keadilan Pendidikan

Program KIP tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Pendidikan merupakan salah satu jalur mobilitas sosial, di mana seseorang dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan status sosialnya melalui peningkatan kualitas pendidikan. Melalui KIP, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak (Fitriani, 2020). Dalam konteks sosiologi pendidikan, KIP menjadi bagian dari kebijakan afirmatif yang menegaskan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial. Program ini membantu anak-anak dari kelompok marjinal agar tidak tertinggal secara pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sila ke-5, yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang menempatkan pemerataan pendidikan sebagai dasar terciptanya keadilan sosial di masyarakat (Kemendikbudristek, 2023).

3. Tantangan dan Strategi Peningkatan Efektivitas

Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan program KIP di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis. Salah satu kendala utama adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Proses verifikasi dan validasi data masih sering mengalami kesalahan, sehingga terdapat penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, sementara peserta didik yang benar-benar membutuhkan justru belum terdaftar (Sari, 2021). Selain itu, beberapa sekolah mengalami keterlambatan pencairan dana yang berdampak pada tidak optimalnya penggunaan bantuan pada waktu yang tepat (Nuraini, 2022). Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas program adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Masih banyak orang tua penerima bantuan yang belum memahami mekanisme penggunaan dana KIP secara benar, sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa (Fitriani, 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KIP, diperlukan sejumlah strategi perbaikan baik dari segi kebijakan maupun teknis di lapangan.

- Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan dan verifikasi penerima manfaat agar lebih akurat dan transparan. Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala dapat membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan penerima (BPS, 2023).
- Kedua, perlu adanya peningkatan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan.
- Ketiga, kegiatan sosialisasi dan pendampingan masyarakat harus diperluas agar orang tua memahami tujuan dan cara pemanfaatan dana KIP dengan tepat (Hidayat, 2022).

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan KIP dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan serta mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kontribusi besar dalam membuka kesempatan belajar bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan dana pendidikan yang diberikan, KIP membantu peserta didik memenuhi kebutuhan dasar sekolah seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Program ini turut menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi siswa, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Dengan demikian, KIP berperan penting dalam mendorong terwujudnya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.

Selain memberikan dampak di bidang pendidikan, keberadaan KIP juga memiliki nilai sosial yang besar. Program ini membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidaktepatan data penerima bantuan, keterlambatan penyaluran dana, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas program, diperlukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perbaikan Pendataan : Memperkuat system pendataan dann verifikasi penerima manfaat agar lebih akurat dan transparan, seperti memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala
2. Peningkatan Koordinasi : Meningkatkan koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan.
3. Sosialisasi dan Pendampingan : Memperluas kegiatan sosialisasi dan pendampingan agar orang tua mmahami tujuan dan cara pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) deng tepat.

Secara keseluruhan, Program Kartu Indonesia Pintar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan perbaikan berkelanjutan serta dukungan dari semua pihak, program ini berpotensi menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan kesempatan pendidikan di seluruh Indonesia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penulisan artikel ini. Semoga hasil tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memahami pentingnya Program Kartu Indonesia Pintar dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan yang layak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia: Kondisi pendidikan menurut jenjang dan wilayah*. Jakarta: BPS.

- Bappenas. (2022). *Evaluasi program Indonesia Pintar terhadap pemerataan akses pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Fitriani, N. (2020). Evaluasi program Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 6(2), 45–53.
- Hidayat, M., & Anwar, T. (2023). Dampak program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di daerah tertinggal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3), 199–210.
- Hidayat, R. (2022). Peran program Kartu Indonesia Pintar dalam menekan angka putus sekolah di daerah tertinggal. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pendidikan*, 10(1), 33–42.
- Kemendikbud. (2023). *Laporan tahunan program Indonesia Pintar (PIP)*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan evaluasi program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah kartu indonesia pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72.
- Nuraini, L. (2022). Tantangan implementasi program Indonesia Pintar di sekolah menengah pertama. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial*, 7(3), 101–110.
- Pulungan, I. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di SMP Negeri 2 Tanjung Pura Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, A. N., & Lestari, M. W. (2022). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di daerah perdesaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 7(1), 34–48.
- Rahman, I., & Suryani, D. (2022). Implementasi KIP dan tantangan ketepatan sasaran di sekolah menengah pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 51–66.
- Rini, P. P., Muhyidin, A., & Atikah, C. (2024). Peran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan tinggi (studi kasus Universitas Salakanagara). *Metakognisi*, 6(2), 119-126.
- Sari, D. A. (2021). Analisis efektivitas penyaluran dana program Indonesia Pintar di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 5(1), 23–31.
- Sari, D. R., & Rahmawati, E. (2021). Efektivitas program Indonesia Pintar dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 110–124.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhada, A. (2024). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan (Studi Di SDN Tonjong 1). *Jurnal Administrasi Publik Riset Inovatif*, 1(1), 64-74.
- Sukmadinata, N. S. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.